

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penerapan aplikasi web telah meluas ke berbagai bidang, mulai dari perbankan, asuransi, bisnis, manufaktur, pendidikan dan pemerintahan. Dalam dunia pemerintahan, aplikasi web digunakan dalam banyak hal diantaranya untuk publikasi informasi tentang daerah, potensi investasi, dan berbagai informasi lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak.

Keharusan pembangunan situs web disetiap Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota merupakan tuntutan akan informasi yang cepat dan terupdate setiap waktu, selain itu juga pembangunan tersebut dibuat guna menuju Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Berdasarkan dokumentasi yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, kondisi Sistem Informasi Nasional kita saat ini yaitu sebagai berikut :

1. Eksisnya pulau-pulau informasi.
2. Sistem keamanan yang tidak memadai dan tidak ada audit.
3. Inkonsistensi data dan informasi.
4. Infrastruktur yang tidak memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa begitu banyak permasalahan yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah agar tujuan dari SISFONAS membentuk Pemerintahan yang bersifat *Good Governance* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dapat terwujud.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 yaitu mengeluarkan panduan isi pembangunan situs web Pemerintah Daerah. Tapi sayangnya pembuatan panduan tersebut dibuat dengan cara menganalisis 90 situs Pemerintah Daerah, dimana kondisi pembangunan web Pemerintah Daerah yang saat itu hingga saat ini masih terkesan asal jadi saja. Semestinya Pemerintah dalam membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, bukan didasarkan dengan cara menganalisa 90 situs yang sebelumnya dibuat dengan inisiatif masing-masing dan terkesan sia-sia. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak dijadikannya panduan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dan pengembang dalam pembuatan isi situs web Pemerintah Daerah.

Tugas Akhir ini akan membuat standarisasi kebutuhan dari isi minimal situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya dan sebaiknya ada pada sebuah web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena dalam pembangunan Sistem Informasi Nasional, bukan hanya infrastruktur saja yang diperhatikan tetapi juga infostruktur (content) yang menjadi tujuan utama mengapa Sistem Informasi Nasional diperlukan. Dan Tugas Akhir ini juga akan

membuat usulan *National Framework*, sebagai upaya pembentukan satu kerangka sistem informasi secara nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada dalam pembangunan SISFONAS :

1. Pembangunan aplikasi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibuat secara sporadis dan dengan inisiatif masing-masing.
2. Eksisnya pulau-pulau informasi, hal ini disebabkan karena institusi pemerintah memiliki kerangka Sistem Informasi yang berdiri sendiri.
3. Terjadinya inkonsistensi data dan informasi yang ditampilkan.
4. Panduan pembangunan isi situs web Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak didasarkan pada Undang-Undang, tetapi dibuat berdasarkan analisis 90 situs daerah yang ada, yang sebelumnya belum memiliki panduan penyusunan dan juga didapat dari jajak pendapat 90 pengelola situs web Pemerintah Daerah.
5. Banyak Pemerintah Daerah dan pengembang situs web Pemerintah Daerah yang tidak mengerti tentang tujuan pembuatan isi web Pemerintahan Daerah sehingga dalam pembuatannya situs web Pemerintah Daerah lebih mengutamakan tampilan dari pada isi sehingga terjadinya inkonsistensi data. Sedangkan isi yang ditampilkan jauh dari perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga nantinya dapat diintegrasikan secara nasional.

Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu :

1. Tidak membuat Standarisasi Isi Web Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Tidak melakukan integrasi sistem sebagai bahasan pada usulan National Framework.
3. Situs yang dibuat merupakan web informasi pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Situs web Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibuat hanya merupakan wadah untuk menampilkan data-data dari hasil standarisasi isi web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan aplikasi bukan menjadi bahasan dalam skripsi ini. Aplikasi dibuat agar data-data yang ada dapat ditampilkan dan dibandingkan dengan beberapa situs resmi Pemerintah Daerah yang ada saat ini.
5. Dari usulan National Framework yang dibuat, data yang dibangun pada TA ini hanya pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan TA ini sendiri yaitu :

1. Membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang dan kebutuhan Sistem Informasi, yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan isi situs web Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Membuat implementasi web resmi Pemerintah Daerah dalam hal ini membangun web resmi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat. Implementasi web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten ini bertujuan supaya standarisasi yang telah dibuat dapat direalisasikan dengan data yang sebenarnya.
3. Membuat usulan national framework guna menciptakan satu jendela bagi situs-situs pemerintah daerah dan memperlihatkan alur pertukaran data diantara instansi-instansi pemerintahan yang ada guna terciptanya SISFONAS nantinya.

1.4 Metodologi Penyelesaian Masalah

Metode yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur dan analisis dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Studi Literatur :
 - a. Pencarian referensi, mencari referensi dan sumber-sumber lain yang layak yang berhubungan dengan TA ini.
 - b. Pendalaman materi, mempelajari dan memahami materi yang berhubungan dengan tugas akhir.
2. Melakukan analisa terhadap standar isi web Pemerintah Daerah yang telah ada.
3. Menganalisa Undang-Undang sebagai landasan kuat guna menunjang isi standarisasi yang akan dibuat.
4. Membuat usulan standarisasi isi web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang dan analisis beberapa situs web Pemerintah Daerah.
5. Membuat usulan nasional framework guna terciptanya satu jendela bagi situs pemerintah daerah dan memperlihatkan alur perpindahan informasi secara global.
6. Melakukan pengumpulan data terhadap isi standarisasi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibuat.
7. Membuat implemementasi web resmi pemerintah daerah dengan metode cms (*content management system*) sebagai wadah mempublikasikan data dari isi standarisasi yang telah dibuat sebelumnya.
8. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap usulan standarisasi dan kerangka national framework yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pengguna dan pengelola situs web Pemerintah Daerah. Penilaian akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan tempat penulis melakukan penelitian.
9. Pengambilan kesimpulan dan penyusunan laporan tugas akhir.